

**TINJAUAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**DI KOTA PARIAMAN**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
Program (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli*

*Madya*



Oleh:

**ALDI ILVANDRI**

**2018/18233004**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGRI PADANG**

**2023**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

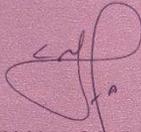
TUNJAUAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI  
KOTA PARIAMAN

Nama : Aldi Ilvandri  
NIM : 18233004  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 28 Agustus 2023

Diketahui Oleh:

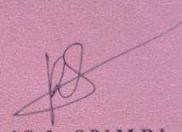
Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM  
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Rani Sofya S.Pd M.Pd  
NIP. 198709172014042001

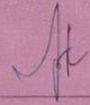
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TUNJAUAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI  
KOTA PARIAMAN

Nama : Aldi Ilvandri  
NIM : 18233004  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji  
Tugas Akhir Prodi Studi Diploma DIII Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 28 Agustus 2023

No.	Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Rani Sofya S.Pd, M.Pd	(Ketua)	
2	Dr. Dessi Susanti S.Pd, M.Pd	(Anggota)	
3	Astra Prima Budiarti, SE, BBA Hons, MM	(Anggota)	

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aldi Ilvandri  
Thn Masuk/NIM : 2018/18233004  
Tempat/Tgl Lahir : Tandikat, 05 Desember 1999  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Keahlian : Diploma III  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Pasar Tandikat  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Pariaman

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila ditandatangani oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa cabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Februari 2024

Yang menyatakan



Aldi Ilvandri

NIM. 18233004

## **ABSTRAK**

**Aldi Ilvandri (18233004) : Tinjauan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kota Pariaman**

**Pembimbing : Rani Sofya, S.Pd, M.Pd**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Kota Pariaman . Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif kuantitatif. Untuk sumber data penelitian menggunakan data sekunder yaitu data diperoleh melalui dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang berhubungan dengan retribusi daerah, dan data primer yaitu dengan melakukan wawancara secara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pihak Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman mengenai instansi dan gambaran singkat tentang pendapatan retribusi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (2) tingkat kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan berkisar 15,4% sampai 186,9% dengan rata-rata sebesar 69,57%, Ini diartikan bahwa retribusi pelayanan kesehatan masuk dalam kategori sangat baik dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman. (3) kendala yang timbul pada tahun 2018,2019,2020,2021 sangat tidak efektif oleh pihak BPKPD dikarenakan pemungutan serta pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dilakukan oleh masing-masing pihak puskesmas.

Dengan adanya penerimaan retribusi pelayanan kesehatan ini diharapkan pemerintah daerah Kota Pariaman memiliki peluang untuk meningkatkan PAD melalui retribusi pelayanan kesehatan, sehingga kontribusi yang diberikan oleh retribusi pelayanan kesehatan terhadap PAD dinilai besar dan cukup dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Pariaman.

**Kata Kunci : Retribusi Pelayanan Kesehatan**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah membeikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Pariaman ”**.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penulisan Tugas Akhir ini, hal ini disebabkan karena kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada program Studi DIII Manajemen Pajak. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan informasi dari berbagai sumber. Untuk itu, pernyataan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmatNya dalam penulisan Tugas Akhir ini.
2. Orang tua tercinta, ayahanda (Armen YD) dan ibunda (Meciko) beserta sausara-saudara tersayang atas doa dan segala pengorbanan baik oril maupun materil kepada penulis.
3. Ibu Chichi Andriani, SE, M.M, selaku ketua program studi DIII Manajemen Pajak.

4. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Ibu Rani Sofya, S.Pd, M.Pd. yang dengan bijaksana dan penuh kesabaran memberikan pengarahan kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Rekan-rekan mahasiswa program studi DIII Manajemen Pajak angkatan 2018.
7. Pimpinan dan Pegawai staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang telah mempermudah peneliti
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala bantuan dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebajikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT, aamiin.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Padang, Juli 2023

Penulis

Aldi Ilvandri

NIM 18233004

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pendapatan Asli Daerah .....	9
1. Defenisi Pendapatan Daerah (PAD).....	9
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10
B. Retribusi Daerah.....	11
1. Defenisi Retribusi Daerah .....	11
2. Ciri-ciri Retribusi Daerah.....	11
3. Subjek Retribusi Daerah .....	12
4. Objek Retribusi Daerah.....	12
5. Bukan Objek Retribusi Daerah .....	13
6. Jenis-jenis Retrubusi Daerah.....	13
7. Pemungutan Retrubusi Daerah.....	17
C. Retribusi Pelayanan Kesehatan .....	18
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN .....	26
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir .....	26
1. Lokasi Penelitian.....	26

2. Waktu Penelitian .....	26
B. Rancangan penelitian .....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Tahapan Penelitian.....	27
3. Objek Penelitian .....	28
4. Sumber Data .....	29
5. Teknik Analisis Data.....	29
 BAB IV PEMBAHASAN.....	 30
A. Profil Perusahaan .....	30
1. Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman .....	30
2. Visi dan Misi.....	31
3. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi.....	32
4. Bagan Organisasi BPKPD Kota Pariaman.....	42
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	43
 BAB V PENUTUP.....	 53
1. Kesimpulan .....	
2. Saran.....	54
 DAFTAR PUSTAKA .....	 55
 LAMPIRAN.....	 57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Target dan Realisasi Penrimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2019 sampai dengan 2021.....	5
Tabel 2.	Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Pariaman.....	20
Tabel 3.	Realiasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)atas Pendapatan pajak Dan Retribusi Daerah.....	43
Tabel 4.	Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 sampai dengan 2021.....	45
Tabel 5.	Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2018 sampai dengan 2021.....	48
Tabel 6.	Tingkat efektivitas Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2018 Sampai dengan tahun 2021.....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	42
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Observasi.....	.57
Lampiran 2. Surat Balasan Observasi.....	58
Lampiran 3. Data Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Pariaman Tahun 2018 sampai dengan 2021.....	.59
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan dan Transkrip Wawancara .....	63
Lampiran 5. Dokumentasi.....	65

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki pemerintahan berupa pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi Penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi ini dilakukan dengan tujuan mengakomodir kebutuhan dan pengembangan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia.

Desentralisasi dilakukan dengan harapan daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonom yang nyata. Adanya otonomi daerah dituntut untuk dapat mengedepankan kemandirian daerah. Syarat utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya kemandirian dalam bidang keuangan. Keuangan merupakan hal yang penting dalam daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah dan pembangunan yang tidak membutuhkan biaya. Dampak dari adanya otonomi daerah adalah semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada serta mempunyai kewenangan untuk mengatur dan memberikan suatu kebijakan tertentu. Kegiatan pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada, untuk itu kegiatan pembangunan lebih diarahkan ke

daerah-daerah, sehingga daerah mempunyai wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan Pendapatan asli daerah (PAD) bagi pembangunan daerah. Disamping itu, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur sendiri sumber-sumber PAD berdasarkan karakteristik daerahnya masing-masing. Menurut Darise (2009: 48) pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan lain-lain.

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar untuk menunjang proses pembangunan dan pemeritahan daerah. Retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat (2) tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemeberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. retribusi daerah akan memberikan hasil yang maksimal apabila proses implementasinya sesuai dengan yang berlaku.

Pelaksanaan pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia seluruhnya. Berbagai program pengembangan telah diselenggarakan oleh

pemerintah, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat mental adalah upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Begitu pula pembangunan di bidang kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan upaya hidup sehat setiap penduduk untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, pada hakekatnya adalah upaya untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan memiliki produktivitas yang tinggi sehingga akan menjadi modal yang tangguh. Kesehatan adalah suatu indikator keberhasilan pembangunan yang dihasilkan oleh suatu negara. Apabila derajat kesehatannya tinggi dapat ditunjukkan rendahnya angka kesakitan, rendahnya angka kematian, dan meningkatnya kualitas gizi masyarakat, maka dapat dikatakan pembangunan suatu negara itu berhasil. Maka sebaliknya, apabila derajat kesehatan itu rendah maka pembangunan yang dilaksanakan belum dapat dikatakan berhasil.

Untuk itu demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan yang tinggi perlu dilakukan suatu pengelolaan retribusi pelayanan yang baik, sistem pengelolaan retribusi pelayanan yang baik diyakini mampu memberikan kontribusi demi terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Semakin baik pelayanan yang disediakan pemerintah maka penerimaan dari retribusi akan semakin meningkat, sebaliknya semakin buruk pelayanan yang disediakan maka penerimaan retribusi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Salah satu jenis pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat adalah di bidang kesehatan. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan, karena kesehatan merupakan salah satu aspek dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan maka dipungut retribusi kepada masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan.

Untuk meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan segenap komponen masyarakat sesuai dengan kemampuannya ekonominya dan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai. Upaya penyediaan sumber pembiayaan untuk pelayanan kesehatan antara lain dilakukan melalui penarikan retribusi pelayanan kesehatan.

Berdasarkan jenisnya, Retribusi Daerah dibedakan atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah salah satu retribusi daerah yang tergolong ke dalam jenis retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan yang di puskesmas, puskesmas keliling, pukesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah, serta tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Retribusi pelayanan kesehatan di Kota Pariaman yang dikenakan kepada wajib bayar (pasien) atas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan UGD, Perawatan rawat inap, persalinan, tindakan medik, tindakan gigi dan mulut, laboratorium, konsultasi sampai dengan perawatan jenazah. Tarif retribusi pelayanan kesehatan dimulai dari tarif Rp. 5.000 sampai dengan tarif Rp.

100.000. pelayanan kesehatan yang di berikan kepada pasien merupakan sumber retribusi yang di terima oleh daerah di kota pariaman. Penerimaan retribusi tersebut tentu akan berkontribusi pada peningkatan PAD Kota Pariaman. Namun berdasarkan data target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2018 sampai 2021 di Kota Pariaman di ketahui bahwa realisasi retribusi mengalami penurunan.

Berikut data lengkap tentang perbandingan target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Kota Pariaman.

**Tabel 1. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2019 sampai dengan 2021 di Kota Pariaman.**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	816.770.000	642.421.788	78,65%
2019	1.627.000.000	1.092.151.566	67,13%
2020	4.000.000.000	3.470.227.893	86,76%
2021	6.000.000.000	7.124.561.902	118,74%

*Sumber: BPKPD Kota pariaman (2022)*

Berdasarkan tabel diatas dari perhitungan 4 tahun, pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Realisasi retribusi pelayanan kesehatan pada tahun 2018 sebesar Rp 642.421.788 dengan persentase 78,65%. Mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar Rp1.092.151.566 dengan persentase 67,13% dan di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.470.227.893 dengan persentase 86,76%.

Dari ralisasi tersebut tidak sesuai dengan target. Dan pada tahun 2021 retribusi pelayanan kesehatan mengalami kenaikan sebesar Rp 7.124.561.902 dengan persentase 118,74% dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 realisasi retribusi pelayanan kesehatan di Kota Pariaman tidak mencapai target yang ditetapkan.

Seiring berjalannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kota Pariaman diharapkan dan dituntut untuk mampu mengelola serta memaksimalkan potensi yang ada pada daerah demi kelangsungan dan kemajuan daerah. Potensi tersebut bisa didapatkan salah satunya dari sumber penerimaan yang berasal dari retribusi daerah. Dengan adanya penerimaan retribusi pelayanan kesehatan ini diharapkan pemerintah daerah Kota Pariaman memiliki peluang untuk meningkatkan PAD melalui retribusi pelayanan kesehatan, sehingga sumbangan yang diberikan oleh retribusi pelayanan kesehatan terhadap PAD dinilai besar dan cukup dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah di Kota Pariaman.

Berdasarkan latar belakang diatas dan melihat tingkat penerimaan pajak retribusi pelayanan kesehatan di Kota Pariaman, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Pariaman”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan pada latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelolaan efektifitas retribusi pelayanan kesehatan di Kota Pariaman?
2. Bagaimana penerimaan kontribusi retribusi pelayanan kesehatan terhadap keseluruhan penerimaan retribusi di Kota Pariaman?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini

1. Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan di Kota Pariaman
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan terhadap keseluruhan penerimaan retribusi di Kota Pariaman

## **D. Manfaat penelitian**

Ada pun manfaat di peroleh dari penelitian ini adalah ;

1. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana Tinjauan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kota Pariaman, juga merupakan proses pembelajaran dalam berdisiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan.

## 2. Bagi pemerintah

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai alat evaluasi atas kinerja yang dicapai oleh pemerintah, sehingga membantu pemerintah dalam mengambil suatu kebijaka

## 3. Bagi pembaca

Dapat dijadikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Tinjauan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan dapat dijadikan referensi, khususya bagi pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah bahasan dalam laporan ini.